

**PENGARUH PENGAWASAN MELEKAT, PENGAWASAN FUNGSIONAL,
PENGAWASAN PREVENTIF, PENGAWASAN DETEKTIF DAN
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN ANGGARAN**
(Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau)

Oleh :

Voadhe Dendi

Pembimbing : Kamaliah dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : voadhe.dendi91@gmail.com

*Ethical Orientation, Professional Commitment, Organizational Commitment And
Ethical Sensitivity Of Internal Whistleblowing
(Study empiris in SKPD Pekanbaru City)*

ABSTRACT

This research was conducted on employees SKPD Riau Province. This research was included in the quantitative research. The type of data used in this research is the primary data by source. And then, in data collections sampling was conducted with a purposive sampling method (Sugiyono,2012: 392) with respondents as many as 81 employees who working in SKPD Riau Province. Data were analyzed using multiple regression with SPSS version 20. This research aimed to know the influence of the Attached Supervision, Functional Supervision, Preventive Supervision, Detective Supervision and Performance-based Budgeting to the Effectiveness of budget control. The main problem that researcher descriptions are as follows: to see how many significant relationship between the dependent variable to the independent variable. The results of this research showed that Attached Supervision influence to the Effectiveness of budget control, Functional Supervision does not affect to the Effectiveness of budget control, Preventive Supervision does not affect to the Effectiveness of budget control, Detective Supervision does not affect to the Effectiveness of budget control and Performance-based Budgeting does not affect to the Effectiveness of budget control.

Keywords: *Effectiveness of budget control, Attached Supervision, Functional Supervision, Preventive Supervision, Detective Supervision.*

PENDAHULUAN

Pada era otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Dengan adanya otonomi memberikan jalan

bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik.

Maraknya permasalahan yang menjerat oknum di instansi pemerintahan di Indonesia yang tersandung kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelembungan dana proyek dan sejenisnya lebih disebabkan oleh kurangnya perlakuan yang baik terhadap pelaksanaan anggaran, maka diperlukan peningkatan pengendalian anggaran. Tidak terbatas hanya pada peningkatan keahlian tapi juga dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran yang tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kebocoran anggaran. Hal ini menjadikan prosedur yang telah dibuat menjadi tidak efektif dalam menjamin terlaksananya pengendalian anggaran.

Anggaran memerlukan pengendalian yang berperan sebagai suatu pedoman untuk membantu segala kegiatan agar berjalan sebagaimana mestinya (Porter, 1992). Jadi, pengendalian terhadap anggaran adalah proses untuk memastikan bahwa anggaran sampai hal yang spesifik dilaksanakan secara tepat dan efisien. Pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dilakukan dengan tujuan menjamin agar pengumpulan penerimaan negara dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan dalam anggaran negara (Revrison, 2000). Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa efektifitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektifitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan. Efektifitas pengendalian terhadap anggaran

akan meminimalisir penyimpangan dan kebocoran anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, Tingkat efektifitas anggaran belanja dikatakan Sangat Efektif jika realisasi anggaran mencapai 100%, dikatakan Efektif jika realisasi anggaran Antara 90%-100%, dikatakan Cukup Efektif bilamana realisasi anggaran mencapai 80%-90%, dikatakan Kurang Efektif jika realisasi anggaran 60%-80% dan dikatakan Tidak Efektif jika realisasi anggaran kurang dari 60%. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran maka ada beberapa faktor sangat berperan penting yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja.

Menurut Revrison (2000) pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan melekat ini maka realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran. Pada dasarnya tujuan pengawasan melekat adalah untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal,

maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/inti yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring dan evaluasi (Revrison, 2000)

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran. Dengan adanya pengawasan preventif maka anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi secara efektif penggunaannya sesuai dengan perhitungannya dan tidak akan terjadi lagi dana-dana yang terbuang yang tidak terserap secara penuh, sehingga anggaran yang telah ditetapkan akan terealisasi dan terkendali sesuai yang telah ditetapkan. Semakin baik dan bagus pengawasan preventif yang dilakukan maka akan semakin bagus pula pengendalian anggaran tersebut.

Revrison (2000) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi,

pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif.

Anggaran berbasis kinerja adalah merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut (Halim, 2013). Menurut Mardiasmo (2009) anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya penciptaan hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Kejelasan target kinerja atau prestasi kerja yang akan dicapai dalam model penganggaran berbasis kinerja ini menunjukkan bahwa model penganggaran ini lebih memfokuskan pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh anggaran. Anggaran pada sektor pemerintah selama ini berfungsi sebagai alat pengendalian.

Tujuan utama pengendalian anggaran ini adalah untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tidak melampaui plafon anggaran. Selain untuk pengendalian anggaran, seharusnya anggaran juga dapat digunakan untuk pengendalian kinerja atau prestasi kerja yang dicapai. Untuk dapat melakukan pengendalian kinerja tersebut tentunya target kinerja yang ingin dicapai oleh suatu unit organisasi dapat ditentukan dengan jelas dalam anggarannya. Oleh karena itu, model penganggaran berbasis kinerja yang dalam penyusunan anggarannya didasarkan pada kejelasan target kinerja seharusnya dapat digunakan sebagai alat pengendalian kinerja

disamping juga sebagai alat pengendalian anggaran.

Tingkat realisasi anggaran dari setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi Riau dinilai masih banyak yang tidak tercapai target. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Riau yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) bahwa capaian Realisasi Belanja Operasi hanya 59,94% (Rp 3.249.086.497.893 dari total anggaran Rp 5.420.129.971.393) dan Belanja Modal sebesar 42,87% (Rp 623.644.302.765 dari total anggaran Rp 1.454.864.928.872). Data tingkat realisasi anggaran yang diperoleh dari informasi yang di publikasikan pada media massa menyatakan bahwa realisasi anggaran tahun 2014 di Provinsi Riau 60% lebih. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak pemegang kebijakan baik itu dari eksekutif atau pun legislatif dalam pengelolaan keuangan daerah (www.RiauTerkini.com). Wakil Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman mengatakan rendahnya realisasi tersebut karena adanya irrasionalisasi terhadap APBD murni. Sebabnya, program-program dan alokasi anggaran yang ada pada APBD merupakan produk dari Gubernur Riau sebelum pasangan Gubernur Riau Annas Maamun dilantik pada Februari 2014, dan ada yang dinilai tidak sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang daerah (www.AntarRiau.com).

Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan terhadap pengendalian anggaran tersebut. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa apakah pengawasan telah

dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Setiap kekurangan dan kelemahan dari pelaksanaan pengendalian anggaran, akan berdampak pada realisasi anggaran yang kurang optimal. Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal. Pengawasan itu sendiri bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu diperlukannya peningkatan pengendalian dan pengawasan dalam setiap penyaluran kegiatan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, Pengawasan Detektif Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran”**.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1) Apakah pengawasan melekat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran?

2) Apakah pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran?

3) Apakah pengawasan preventif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran?

4) Apakah pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran?

5) Apakah penganggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

pengendalian anggaran?

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.
- 2) Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.
- 3) Pengaruh Pengawasan Preventif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.
- 4) Pengaruh Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.
- 5) Pengaruh Pengawasan Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.

TELAAH PUSTAKA

Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Menurut Revrisond (2000) pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan melekat ini maka realisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih terarah dalam pencapaian sasaran anggaran. Pada dasarnya tujuan pengawasan melekat adalah untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan dan rencana adalah pihak atasan, maka pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat merupakan suatu tindakan yang menjadi bagian dari aspek pengendalian, apabila pengawasan melekat telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku maka akan mendukung tercapainya efektivitas pengendalian anggaran yang baik yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Menurut Revrisond (2000) Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik berasal dari lingkungan internal, maupun dari lingkungan eksternal pemerintahan. Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan itu, berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/inti yang mempunyai tugas melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring dan evaluasi.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah dalam hal pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku maka sangat diperlukan adanya pengawasan. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pengawasan fungsional terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah itu sendiri. Pengawasan fungsional sebagai bentuk kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan fungsional ini akan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Mardiasmo (2004:134) mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jadi, efektivitas pengendalian anggaran adalah berhasil atau tidaknya tujuan dari pengendalian terhadap anggaran tersebut dilaksanakan.

Pengawasan preventif sangat berhubungan dengan efektivitas pengendalian anggaran. Pengawasan preventif menurut teori merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung, dan pengawasan ini dapat dijadikan sebagai pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan terhadap anggaran. Dengan adanya pengawasan preventif maka anggaran yang telah ditetapkan dapat diawasi secara efektif penggunaannya sesuai dengan perhitungannya dan tidak akan terjadi lagi dana-dana yang terbuang yang tidak terserap secara penuh, sehingga anggaran yang telah ditetapkan akan terealisasi dan terkendali sesuai yang telah ditetapkan.

Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Revrisond (2000) membagi pengawasan menurut sifatnya menjadi pengawasan preventif dan pengawasan detektif. Setelah pengawasan preventif dilaksanakan, maka nantinya aparat yang ditugaskan untuk mengawasi anggaran akan melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa anggaran telah dijalankan sebagaimana mestinya dan mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi, ini disebut dengan pengawasan detektif.

Revrisond (2000) mengatakan pengawasan detektif adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban, yang biasanya dilaksanakan setelah dilakukan suatu kegiatan. Selanjutnya Revrisond (2000) mengatakan bahwa pengawasan sesungguhnya mencakup aspek pengendalian dan pemeriksaan yang dilakukan pihak atasan terhadap bawahan. Jadi, pengawasan detektif merupakan salah satu aspek yang mendukung untuk terlaksananya pengendalian yang efektif. Semakin baik pengawasan detektif yang diterapkan maka akan semakin efektif pengendalian anggaran yang dilaksanakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) dan Uci (2012) menyatakan bahwa pengawasan detektif berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

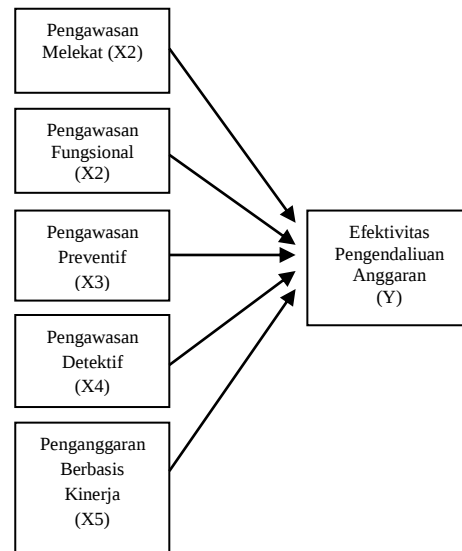
Menurut Halim (2013) anggaran berbasis kinerja adalah merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya penciptaan hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Anggaran sektor public mempunyai beberapa fungsi, yaitu alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik,, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, dan alat menciptakan ruang publik. Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana terperinci atas pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan pemerintah agar pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sebagai alat pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran

Dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik dengan mengkaitkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang dicapai dengan penggunaan kinerja secara sistematis. Dengan adanya penganggaran berbasis kinerja dapat diharapkan akan meningkatkan efektivitas pengendalian anggaran.

Model Penelitian

Gambar1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut :

- H₁: Pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran
- H₂: Pengawasan fungsional berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran
- H₃ : Pengawasan preventif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran
- H₄ : Pengawasan detektif berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran
- H₅ : Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini dilakukan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 31 dinas dan badan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas, Kepala Sub.bagian keuangan dan Kepala Bidang. Responden dalam penelitian ini berjumlah 93 orang dari 31 SKPD yang masing-masing SKPD ada 3 responden.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber. Data primer secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data ini diperoleh dari hasil jawaban para responden atas kuesioner yang diajukan dimana responden diperkenankan memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai.

Prosedur pengumpulan data menggunakan pengumpulan data primer, yaitu kuesioner. Kuesioner yang telah terstruktur dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuesioner terdiri dari 93 eksemplar akan dibagikan ke kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Masing-masing kantor mendapat 3 buah kuesioner yang ditujukan kepada Kepala Dinas, Kepala Sub.bagian keuangan dan Kepala Bidang. Skala pengukuran responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) poin dengan skala likert dengan lima pilihan jawaban.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Efektivitas Pengendalian Anggaran, Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif, pengawasan Detektif dan Penganggaran Berbasis Kinerja disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Ma x	Mean	Std. Deviation
Efektivitas Pengendalian Anggaran	81	22	35	29,3580	2,92536
Pengawasan Melekat	81	46	80	64,7778	6,36985
Pengawasan Fungsional	81	20	40	32,8395	4,08490
Pengawasan Preventif	81	48	69	58,2469	4,93085
Pengawasan Detektif	81	16	35	29,3827	3,21157
Penganggaran Berbasis Kinerja	81	64	95	80,0247	6,60298
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Data Olahan, 2016

Hasil Uji Validitas Data dan Reliabilitas Data

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas berdasarkan hasil uji validitas keseluruhan variabel dalam penelitian ini, dari semua pertanyaan yang disebar melalui kuesiner, keseluruhannya dinyatakan valid. Dan berikut adalah tabel hasil uji reliabilitas pada penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Data

No	Variabel	Jumlah Item	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Efektifitas Pengendalian Anggaran (Y)	7	0.753	Reliabel
2	Pengawasan Melekat (X1)	16	0.745	Reliabel
3	Pengawasan Fungsional (X2)	8	0.781	Reliabel
4	Pengawasan Preventif (X3)	14	0.755	Reliabel
5	Pengawasan Detektif (X4)	7	0.790	Reliabel
6	Penganggaran Berbasis Kinerja (X5)	19	0.757	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2016

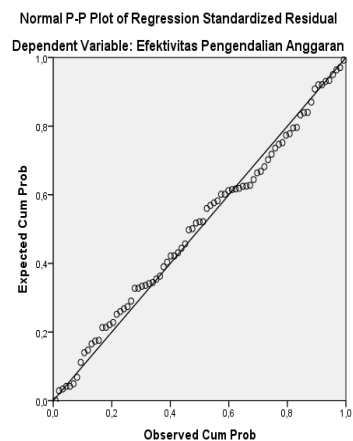
Hasil Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (santoso, 2004:34). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar bawah ini.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Jika $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pengawasan Melekat (X1)	0.551	1.815	Tidak terjadi Multikolinieritas
Pengawasan Fungsional (X2)	0.449	2.227	
Pengawasan Preventif (X3)	0.359	2.786	

Pengawasan Detektif (X4)	0.461	2.168	
Penganggaran Berbasis Kinerja (X5)	0.336	2.976	

Sumber : Data Olahan, 2016

Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson* (DW test). Autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

<i>Durbin Watson</i>		Keterangan
1,583	81	Tidak terdapat Autokorelasi

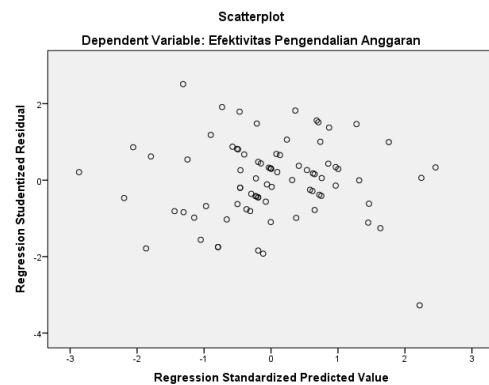
Sumber : Data Olahan, 2016.

Dari hasil perhitungan analisis data diatas, angka DW sebesar 1,583 dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dari penelitian ini bebas dari autokorelasi

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*).

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hasil analisis data untuk masing-masing hipotesis dapat dilihat pada pengujian hipotesis.

Hasil Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} < 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} > 0,05$, maka H_1 ditolak. Dari

hasil penelitian ini bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,164 > 1,992$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,000 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} < \text{dari } 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} > \text{dari } 0,05$, maka H_1 ditolak. Dari hasil penelitian ini bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,424 < 1,992$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,673 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Preventif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} < \text{dari } 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} > \text{dari } 0,05$, maka H_1 ditolak. Dari hasil penelitian ini bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,399 < 1,992$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,691 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Pengawasan Detektif Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} < \text{dari } 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} > \text{dari } 0,05$, maka H_1 ditolak. Dari hasil penelitian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,378 < 1,992$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,707 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan detektif tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} < \text{dari } 0,05$ maka H_1 diterima, sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $p\text{ value (sign)} > \text{dari } 0,05$, maka H_1 ditolak. Dari hasil penelitian bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $0,098 < 1,992$ dengan nilai signifikansi diperoleh adalah $0,923 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2013:67) Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square
1	,689 ^a	,475

Sumber : Data Olahan, 2016

Dari tabel diatas diperoleh nilai R sebesar 0.689 atau 68.9%. sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.44% atau 44%. Ini menunjukkan bahwa efektifitas pengendalian anggaran di SKPD Provinsi Riau dapat dipengaruhi oleh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja sebesar 44%. Sedangkan sisanya sebesar 66% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pengaruh pengawasan melekat, pengawasan fungsional, pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian anggaran sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa

variabel pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Provinsi Riau.

- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa pengawasan fungsional tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan pengawasan fungsional belum berfungsi secara maksimal dan belum objektif dalam melakukan pengawasan serta banyaknya kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga efektivitas pengendalian anggaran tidak terlaksana dengan baik.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa pengawasan preventif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Provinsi Riau. Hal ini disebabkan oleh kurang telitinya dan konsisten para pegawai dalam menerapkan prosedur yang benar dalam melakukan pengawasan sehingga efektivitas pengendalian anggaran tidak berjalan dengan baik.
- 4) Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa pengawasan detektif tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengendalian anggaran di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan pengawasan detektif belum dilaksanakan dengan baik seperti pemeriksaan berkala laporan pelaksana anggaran, evaluasi

laporan kegiatan, evaluasi laporan pertanggungjawaban bendaharawan, sehingga menyebabkan kurang efektifnya pengendalian anggaran yang dilakukan pemerintah.

- 5) Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa penganggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan para pembuat anggaran tidak memiliki target kinerja yang jelas terkait penganggaran berbasis kinerja, tidak selarasnya target kinerja antar dokumen penyusunan anggaran serta orientasi dari penganggaran tanpa mempertimbangkan output dan tujuan program serta visi dan misi Provinsi Riau. Sehingga membuat efektivitas pengendalian anggaran tidak terlaksana dengan baik.

Keterbatasan

Pengumpulan data melalui kuesioner membutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga waktu pengembalian tidak dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian

diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak SKPD yang ada di Provinsi Riau digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:
 - a. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas yang ada di SKPD.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan supaya dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya, mungkin bukan hanya di instansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, Uci. (2012). Pengaruh Pengawasan Melekat, Pengawasan Fungsional, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Detektif terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran (Studi Empiris pada Satuan

- Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).
- Antara Riau. (2014). "Realisasi Anggaran Belanja Riau Baru 12,76 Persen". Antara Riau (2014). Melalui (www.AntaraRiau.com)
- Hindri Asmoko. 2006. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektifitas Pengendalian. Melalui (<http://www.bppk.depkeu.go.id>).
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta:BPFE.
- Jaka Hendrawan . (2014). Pengaruh Pengawasan Detektif, Pengawasan Preventif dan penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran.
- Jones,R, & M. Pendlebury. (2000). *Public Sector Accounting*. 5th Edition. London: Pitman Publishing.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munandar.(2001). *Budgeting*. Yogyakarta: BPFE.
- Porter, Thomas, (1992). *EDP Pengendalian dan Auditing*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Revrisond Baswir. (1999). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.
- Riau Terkini. (2015). " Realisasi APBD 60 persen lebih". Riau Terkini (2 januari 2015). Melalui (www.RiauTerkini.com)
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf (1993). "*Aspek Hukum Pengawqsan Melekat: Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah.*" Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- T. Hani Handoko. (1995). *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- Widjaja Gunawan. (2002). *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zukifli, Amsyah. (2003). *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.